

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap data pribadi tersebar di beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Menurut Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, membuka dan memberikan data dan/atau informasi pribadi tidak dapat dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak yang data dan/atau informasi pribadinya akan dibuka atau diberikan. Namun hingga saat ini penyalahgunaan terhadap data pribadi tersebut masih sering terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas tindakan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang tidak hanya menggambarkan masalah hukum tapi juga fakta serta gejala lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif terkait permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat disimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk meminta persetujuan tertulis atas data pribadi yang dibuka dan diberikan kepada pihak ketiga, ketidakhadiran suatu badan pengawas yang dibentuk sebagai pengendali data pribadi untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip perlindungan data pribadi yang dituangkan dalam sebuah regulasi secara komprehensif seperti undang-undang serta tingginya tingkat persaingan Telemarketing untuk mendapatkan *data base* sebagai sasaran penawaran produk asuransi yang kemudian menimbulkan permasalahan hukum. Diperlukannya pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi agar ada pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip perlindungan data pribadi dan pelanggaran perlindungan data pribadi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

ABSTRACT

Legal protection against personal data is distributed in several regulations such as Law No. 14 of 2008 on public Information Disclosure and regulation of the Financial Services Authority No. 1/POJK. 07/2013 on consumer Protection of the financial services sector. According to article 17 of law number 14 of 2008 and article 31 of the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK. 07/2013, opening and providing data and/or personal information may not be made without the written consent of the party to which the data and/or its personal information will be opened or provided. But until now the misuse of such personal data is still common. The purpose of this study is to provide for the cause and remedy factors that can be done by the party that is harmed for the act of misuse of personal data conducted by the financial services business.

The research method used is normative law research that is done by researching using secondary data as a basic ingredient by conducting a search for the rules and literature related to the issues studied. Specification of this research is a descriptive analytical that not only describes the legal matter but also the facts and other symptoms based on the prevailing legislation and is associated with legal theories and practices of positive law enforcement related to the problems studied.

The results of the research on the misuse of personal data conducted by the financial services business perpetrators may be concluded that the obligation of the financial services business is not carried out to request the written consent of the personal data opened and provided to the third party, absence of a supervisory body that is formed as a controller of personal data to ensure compliance with the principle of protection of personal data that is outlined in a regulation as a competency such as legislation and high levels of Telemarketing competition to obtain data base as a target for the offer of insurance products which then raises legal issues. The needs of officials or officers who carry out the protection of personal data in order to have a responsible party to ensure compliance with personal data protection principles and violation of personal data protection so as to increase the effectiveness in the implementation of personal data protection, ensure the rights of citizens over private self protection, and ensure recognition and respect for the importance of protection of personal data.